

**ANALISIS PUTUSAN BUPATI SAMPANG NOMOR 188 TENTANG
PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

TESIS



Oleh:

Madhur M
02040422014

Dosen Pembimbing I:

Dr. Mahir Amin, M. Fil.I
NIP: 197212042007011040

Dosen Pembimbing II:

Dr. Sanuri, S.Ag., M. Fil.I
NIP: 197601212007101000

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANAMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madhur M

NIM : 02040422014

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Analisis Putusan Bupati Sampang Nomor 188 Tentang
Penundaan Pemilihan Kepala Desa.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 November 2023

Saya yang menyatakan



Madhur M

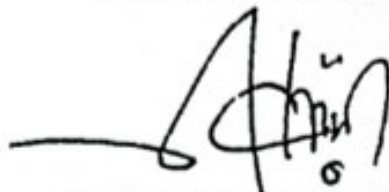
02040422014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "Analisis Putusan Bupati Sampang Nomor 188 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa" yang ditulis oleh Madhur M, NIM. 02040422014 ini telah disetujui pada tanggal 20 November 2023.

Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Mahir Amin, M. Fil.I.

NIP: 197212042007011040

Dosen Pembimbing II



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I

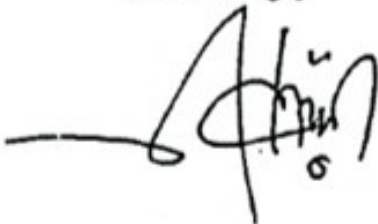
NIP: 197601212007101000

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Madhur M, NIM. 02040422014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasyah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Sidang Munaqasyah:

Ketua Penguji



Dr. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011040

Sekretaris Penguji



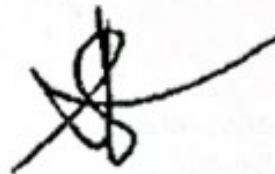
Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197601212007101000

Penguji I



Dr. H. Priyo Handoko, SS, S.H., M. HUM
NIP. 196602122007011049

Penguji II



Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si.
NIP. 197202062007101003

Surabaya, 01 Desember 2023

Mengesahkan,
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Direktur Pascasarjana,



Prof. H. Masdar Hilmy, M.Ag., Ph.D
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Madhur M
NIM : 02040422014
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : madhurmali@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : Analisis Putusan Bupati Sampang Nomor 188 Tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 November 2023

Madhur M

Abstrak

Tesis dengan judul “Analisis Putusan Bupati Sampang No 188 Tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa”, ini untuk menjawab pertanyaan tentang apakah bupati Sampang berwenang untuk menunda pilkades sampai tahun 2025, dan bagaimana dampak dari Surat Keputusan Bupati Sampang tersebut dilihat dari perspektif demokrasi.

Penelitian tentang, Analisis Putusan Bupati Sampang No 188 Tentang Penundaan Pilkades dalam Perspektif Demokrasi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yuridis, dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*), untuk mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan penundaan pilkades di Indonesia, dan pendekatan konseptual, (*conseptual approach*), untuk mengkaji permasalahan penelitian melalui doktrin-doktrin hukum, pandangan para ahli, dan asas-asas hukum untuk Menyusun konsep ideal tentang penundaan pelaksanaan pilkades di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, secara konstitusional surat keputusan nomor 188 yang dikeluarkan oleh bupati Sampang tentang penundaan pilkades bukan menjadi kewenangan Bupati, karena yang berhak untuk menunda pemilihan kepala desa adalah Mendagri sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 57 yang mengatur tentang kebolehan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa. Menurut pasal 57 ayat 1 dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pilkades, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/wali kota mengangkat penjabat kepala desa, ayat 2 kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Kemudian penundaan pilkades atas SK Bupati tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi dan pemerintahan di tingkat desa. Beberapa dampak utamanya adalah ketidakpastian pemerintahan di tingkat desa, serta menghambat hak warga desa untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Kata Kunci: *Pilkades, Demokrasi, Kewenangan*

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Kerangka Teoritik.....	11
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN.....	20
A. Teori Demokrasi.....	20
1. Definisi Demokrasi.....	20
2. Sejarah Demokrasi.....	29
3. Demokrasi Indonesia.....	32
4. Prinsip-prinsip Demokrasi.....	35
5. Nilai-nilai Demokrasi.....	37
B. Teori Kewenangan.....	41
1. Definisi Kewenangan.....	41
2. Jenis-jenis kewenangan.....	43
BAB III PENUNDAAN PELAKSANAAN PILKADES DI KABUPATEN SAMPANG BERDASARKAN	
SK. BUPATI NO 188 TAHUN 2021.....	56
A. Konsep Keputusan Dalam Tata Usaha Negara.....	56
B. Alasan Hukum SK Bupati Sampang No 188 Tahun 2021 Tentang Penundaan Pilkades.....	67
C. SK Bupati Sampang No 188 Tahun 2021 Tentang Penundaan Pilkades.....	77
D. Dampak SK Bupati Sampang No 188 Tahun 2021 Tentang Penundaan Pilkades Terhadap Hak-hak Demokrasi Masyarakat Sampang.....	79

BAB IV ANALISIS PUTUSAN BUPATI SAMPANG	
NOMOR 188 TAHUN 2021 TENTANG PENUNDAAN	
PILKADES DI KABUPATEN SAMPANG.....	90
A. Analisis Teori Demokrasi Terhadap SK Bupati	
No 188 Tahun 2021 Tentang Penundaan Pilkades di Kabupaten	
Sampang	90
B. Analisis Teori Kewenangan Terhadap SK Bupati No 188 Tahun	
2021 Tentang Penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang	94
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

1. Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 57.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020.
SK Bupati Sampang Nomor 188 tahun 2021.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor. 72 tahun 2020.
Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor. 27 Tahun 2021
Undang-Undang Dasar 1945.

2. Buku

A.A Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”,
Jurnal Ditjen PP Kemenkumham, (Maret, 2010).
Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
Alfian, *Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi di
Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1980).
Amin suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Klaten:
Penerbit Cempaka Putih, 2018).
Andrew Heywood, *Political Theory: An Introduction Edition*, Terj.
Pengantar Teori Politik, E. Setiyawati, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2018).
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata
Negara*, (Bandung: Alumni, 1997).
Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press,
2004).
Budi Hardiman, *Demokrasi Deleberatif Menimbang Negara Hukum
dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen
Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa
Media, 2014).
David Bentham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*,
(Yogyakarta: Kanisius, 2000).
Dhaniel Dakidee, *Peta Politik Pemilihan Umum*, (Jakarta: PT Kompas
Media Nusantara, 2004).

- Eni Kusdarini. *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011).
- Friedmann, *Legal Theory*, (New York, 1967).
- Gaffar Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2001).
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Galia Indonesia, 2007).
- Hantington Samuel dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Hendra Nurtjahyo, *Filsata Demokrasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).
- Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1965), yang dikutip dari buku Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Koencoro Poerba Pranoto, *sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987).
- Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, (Baltimore and London: The Jhons Hopkins University Press, 1999).
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, (Malang: Setara Pres, 2012).
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Meriam Budiarjdo, *dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,; Ed. Revisi, Cet. Ke-7, (Jakarta: Gramedia, 2015).
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

- Muslim Mufti, *Teori-teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Mustamin Matutu, *Mandat, delegasi, atribusi dan implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Nandang Alamsah Dkk, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press, 2019).
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Undang-undang Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).
- Nor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya tulis Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009).
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Richad Mann, *Memperjuangkan Demokrasi di Indonesia*, terj. Maria Irawati Yulianto, (Jakarta: PT. Enka Parihiyangan, 1999).
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Robert A. Dahl, *Dilemmas of Pluralist of Democracy; Autonomy and Control*, (New Haven and London: Yale University Press, 1982).
- S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008).
- Samuel Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 2001).
- SF. Marbun. *Penelitian Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi Dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009).
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2002).

- Winamo, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

3. Jurnal

- Andi Bau Inggit, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No. 1. Mei 2019.
- Ateng Syafrudin, *"Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab"*, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000).
- Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.7 No.3 2016.
- Haris Mubarak dan Indra Fauzan, "Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah Serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik", *Jurnal Politeia*, vol. 11 No. 2 (2019).
- Lia Ni'matul Maula, Putra Astomo, dan Dian Fitri Sabrina, "Legalitas Penetapan Penjabat Walikota Makassar Sebagai Dampak Dari Pemilihan Kepala Daerah 2018," *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1, 2, No. 1 (2019).
- Nancy Borneo, "On Democratic Backsliding", *Jurnal of Democracy*, Vol. 27, No. 1, (2016).
- Ni'matul Huda, "Problematisasi Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024", *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol. 7, No. 2, (2021).
- Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematisasi, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, No.3, (September, 2020).
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No. 5 dan 6, September-Desember, 1997.
- Prabu Buana Rumiarta, *Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi*, *Jurnal Kerta Dytmika*, Vol. 12 No. 12, 2015.
- Restu Firnanda, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan

- Singinga Tahun 2014”, *Jurnal Jom Fisip* Vol. 3, No. 1, (2016).
- Riski Febria Nurita, “Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 1 Juni, 2015.
- Wawan Munawwar Khalid, “The Implementation of Simultaneous Village Head Implementation Policy In Realizing Participatory, Transparent, And Accountable Election Process In Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. XI No.1, (Juni 2019).
- Yuniwati Sutrisno, “Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2 No. 4, (April 2021).

4. Tesis

- Alim Cahyono, *Kewenangan Presiden dalam Penetapan Status Darurat pada Masa Pandemi Covid-19*, (Tesis Magister Hukum Tata Negara, 2022).
- Dadan Ramdani, “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024”, (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022).
- Feti Fajriyanti “Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sumbarang Jatinegara Kabupaten Tegal Bagi Kesejahteraan Masyarakat”, (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri, 2022).
- Mustopa, “Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia”, (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Nafiatul Munawaroh, “Desain Ulang Kewenangan Pejabat Sementara Untuk Membentuk Peraturan Perundang-Undangan”, (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021).

5. Internet

<https://kompaspedia.kompas.id/label/kebijakan-pemerintah-dalam-mengenai-covid19>

Grafik covid19 2021 <https://surabaya.liputan6.com/read/4447217/update-corona-covid-19-jawa-timur-pada-1-januari-2021>. diakses 4 Jan 2023.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pilkades-di-sampang-dan-sumenep-ditunda-imbas-lonjakan-covid-19-diakses-30-desember-2022>